

PENDAHULUAN

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia.” (Q.S. Al Baqarah: 164)

Bahtera yang berlayar dilaut ini tentunya membutuhkan tempat berlabuh untuk membawa hasil lautnya ke daratan, maka diperlukanlah suatu pelabuhan yang dapat menunjang atau mendukung proses berlabuhnya bahtera/ kapal ke darat. Dengan adanya pelabuhan tentunya memerlukan pengelolaan yang baik oleh pihak terkait agar dalam memanfaatkan pelabuhan dapat berjalan dengan baik dan secara berkelanjutan.

Menurut Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan nomor 16 Tahun 2006 Pelabuhan Perikanan merupakan tempat dimana didalamnya terdiri dari daratan dan perairan sebagai tempat kegiatan sistem bisnis perikanan dan berfungsi untuk berlabuh kapal perikanan atau bongkar muat ikan. Pelabuhan Perikanan ini dilengkapi fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang oleh pemerintah. Pelabuhan Perikanan Branta merupakan salah satu pelabuhan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Branta ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pamekasan khususnya masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya terhadap hasil laut, karena pelabuhan merupakan pusat kegiatan ekonomi perikanan.

Berdasarkan hal itu dapat diartikan bahwa Pelabuhan Perikanan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang

kegiatan sistem bisnis perikanan yang bermanfaat bagi pelaku usaha dibidang perikanan khususnya bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya terhadap bisnis perikanan ini. Selanjutnya dalam memaksimalkan peran dan dampak pelabuhan untuk kesejahteraan masyarakat maka di perlukan pengelolaan yang baik oleh pemerintah setempat untuk memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang. Pengelolaan yang baik tidak hanya fokus terhadap Pelabuhan Perikannya saja tetapi juga mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Mendeskripsikan peran dari Pelabuhan Perikanan Branta terhadap aktivitas maupun kegiatan perikanan. 2). Mendeskripsikan dampak dari Pelabuhan Perikanan Branta terhadap masyarakat perikanan sekitar. 3). Mendeskripsikan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Pelabuhan Perikanan Branta

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2016 yaitu antara bulan April-Mei 2016 sedangkan tempat penelitian berlokasi di Pelabuhan Perikanan Branta Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur

Metode yang digunakan pada penelitian yang dilakukan di Pelabuhan Branta ini menggunakan metode deskriptif sedangkan

jenis penelitiannya adalah studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan Dokumentasi Sedangkan pemilihan sample pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling* dan analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelabuhan Perikanan mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang aktifitas perikanan dan sebagai tempat berlabuhnya Kapal Perikanan. Pelabuhan Perikanan biasanya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas keselamatan pelayaran dan sebagai tempat untuk penyebrangan laut, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Pelabuhan Perikanan Branta Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Pelabuhan yang ada di Kabupaten Pamekasan yang mempunyai peran dalam memfasilitasi masyarakat dalam melakukan kegiatan perikanan tangkap mulai dari pengawasan penangkapan ikan, pendaratan ikan sampai dengan pemasaran hasil ikan tangkapan. Pelabuhan Perikanan Branta juga memiliki peran dalam menunjang aktivitas atau kegiatan dibidang perikanan maupun non perikanan, seperti contoh pada usaha penangkapan ikan yang membutuhkan tempat berlabuh atau menambatkan kapal untuk mendaratkan ikan hasil tangkapan dan proses bongkar muat barang.

Sumberdaya yang terkandung di perairan selat madura khususnya di daerah Pelabuhan Perikanan Branta Kabupaten Pamekasan merupakan faktor penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat perikanan di Kabupaten Pamekasan, tentunya sumberdaya tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan dalam mensejahterakan masyarakat. Perairan selat madura memiliki sumberdaya ikan yang besar untuk dimanfaatkan, tetapi dalam pemanfaatannya harus memperhatikan kelestarian dari sumberdaya tersebut agar dapat berkelanjutan (*Sustainable*).

Pengelolaan yang dilakukan di Pelabuhan Perikanan Branta antara lain melakukan sosialisasi tentang penggunaan alat tangkap yang di larang dioperasikan di perairan selat madura karena dapat merusak ekosistem maupun sumberdaya yang terkandung di dalamnya. Terdapat kearifan lokal tentang lingkungan yang berlaku bagi masyarakat Madura khususnya masyarakat di kawasan Pelabuhan yang umumnya beragama Islam yaitu adanya "*Rokat Tasek*" dan kegiatan bersih-bersih lingkungan sekitar yang di percaya untuk mengusir makhluk halus yang dapat mengganggu masyarakat.

Menurut Asiabrain (2010) Sumberdaya Manusia adalah suatu keahlian yang dimiliki oleh setiap individu untuk menunjang keberadaannya dilingkungan sosial dan diperuntukkan untuk mensejahterakan diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Tersedianya potensi sumberdaya perikanan yang melimpah tidak akan berarti apa-apa jika tidak dimanfaatkan dengan optimal, maka dari

itu perlu dilakukan pengelolaan terhadap sumberdaya manusia sebagai subyek yang memanfaatkan potensi tersebut. Pengelolaan terhadap sumberdaya manusia biasanya dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan pengembangan masyarakat pesisir. Kegiatan penyuluhan maupun pengembangan masyarakat mengenai penggunaan alat tangkap sesuai undang-undang, perijinan usaha, sosialisasi mengenai program atau kebijakan yang diberlakukan dan penyampaian informasi terkait dengan pelatihan nelayan.

Banyaknya para pelaku usaha perikanan di sekitar Pelabuhan Perikanan Branta mengharuskan adanya pengelolaan terhadap kegiatan usaha perikanan dengan tujuan agar para masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih optimal dari adanya pelabuhan tersebut. Dalam hal ini masyarakat adalah para nelayan, penjual ikan segar maupun penjual ikan olahan, dan para pengunjung pelabuhan.. Sedangkan aktivitas dari masyarakat itu sendiri meliputi tambat labuh kapal, pendaratan hasil tangkapan, perbekalan kapal perikanan, pelelangan ikan, penjualan ikan olahan, dan pariwisata pelabuhan.

Pembangunan Pelabuhan Perikanan atau Pangkalan Pendaratan Ikan telah menimbulkan dampak pengganda bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar Pelabuhan (Direktorat Prasarana Perikanan Tangkap, 2004). Dengan adanya Pelabuhan Perikanan Branta secara tidak langsung maupun secara langsung tentunya

memberikan dampak yang positif maupun negatif terhadap masyarakat perikanan setempat. Berikut beberapa dampak positif dengan adanya Pelabuhan Perikanan Branta diantaranya meningkatkan taraf hidup nelayan, menciptakan peluang usaha atau pekerjaan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pamekasan maupun Provinsi Jawa Timur.

Pelabuhan Perikanan Branta yang juga terdapat fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) didalamnya yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara langsung dengan mempunyai peluang usaha maupun peluang pekerjaan di bidang perikanan maupun non perikanan. Berikut beberapa peluang usaha dan peluang pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setelah adanya pembangunan Pelabuhan Perikanan Branta: 1). Usaha jual ikan segar. 2). Usaha Jual Ikan olahan. 3) Usaha becak motor dll.

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Branta di Kabupaten Pamekasan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan pada umumnya dan juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pamekasan maupun Pemerintah Pusat. Menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada Bab V (lima) nomor 1 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah.

Meskipun tidak adanya penarikan retribusi terhadap kapal perikanan yang

berlabuh, akan tetapi pembangunan Pelabuhan Perikanan Branta ini memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari segi perijinan kapal, pengelolaan pariwisata Pelabuhan, Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Hak atas tanah para nelayan yang mayoritas penduduknya adalah para nelayan yang pada kesehariannya melakukan aktifitas perikanan di Pelabuhan Perikanan Branta. Tidak adanya penarikan retribusi terhadap kapal perikanan bertujuan untuk meringankan beban nelayan karena dapat menghemat biaya melaut dan diharapkan dapat menambah keuntungan tersendiri bagi nelayan setempat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian tentang Peran dan Dampak Pelabuhan Perikanan Branta Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, maka hasil yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Pelabuhan Perikanan Branta di Kabupaten Pamekasan mempunyai peran dalam memfasilitasi masyarakat untuk menunjang kegiatan perikanan dan mempunyai peran terhadap pertumbuhan industri dan perdagangan di bidang perikanan maupun non perikanan.
2. Dampak dari Pelabuhan diantaranya meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menciptakan peluang usaha dibidang perikanan maupun non perikanan serta dapat berkontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Pamekasan maupun di Provinsi Jawa Timur.

3. Sumberdaya yang terkandung di perairan selat madura khususnya di daerah Pelabuhan Perikanan Branta Kabupaten Pamekasan merupakan faktor penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat perikanan di Kabupaten Pamekasan tentunya sumberdaya tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan dalam mensejahterakan masyarakat. Di dalam memanfaatkan sumberdaya inilah diperlukan pengelolaan yang baik agar tercipta sumberdaya yang berkelanjutan (*sustainable*).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Lembaga Akademis (Perguruan Tinggi dan Mahasiswa) mengusulkan kebijakan dan program-program yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat khususnya para nelayan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya dan ikut berperan aktif di dalam maupun di luar kegiatan atau program-program pemerintah tentang perikanan yang terkait dengan Pelabuhan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
2. Untuk Pemerintah seharusnya lebih bijak dalam mempertimbangkan dan mengevaluasi perumusan kebijakan serta mengkaji ulang tentang penarikan retribusi kapal perikanan, dan membantu perekonomian masyarakat agar lebih sejahtera dalam hal pengelolaan sumberdaya manusia dan pengelolaan

sumberdaya alam yang terkandung dikawasan Pelabuhan Perikanan Branta.

3. Untuk masyarakat harus lebih aktif lagi dalam mengawasi dan melaksanakan program pemerintah dan harus mentaati peraturan-peraturan yang berlaku untuk agar sumberdaya yang ada dikawasan Pelabuhan Perikanan Branta dapat berkelanjutan demi kesejahteraan bersama.
4. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti ialah diperlukannya penelitian lanjutan tentang peran dan dampak dari Pelabuhan Perikanan Branta serta permasalahan dan solusi yang dapat diteliti lebih lanjut untuk kesejahteraan masyarakat di kawasan Pelabuhan Perikanan Branta Kabupaten Pamekasan Jawa Timur.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran: Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah: Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiabrain, 2012. Perencanaan Sumberdaya Manusia.
<http://www.anneahira.com/artikel-umum/sumberdaya-manusia.htm>
Diakses Pada tgl 5 maret 2016 pukul 13.38 WIB.
- Ditjen, Perikanan Tangkap. 2004. Peranan Pelabuhan Perikanan Dalam Penyediaan Data dan Informasi Perikanan. Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Permen. 2006. Pelabuhan Perikanan. Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan nomor 16 Tahun 2006: Jakarta.

